

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

(Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Eks Karisedenan Surakarta

Tahun Anggaran 2010-2012)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

VIVI ANISA LUKITA P

B 200 100 330

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca jurnal publikasi dengan judul:

“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Eks Karisedenan Surakarta Tahun Anggaran 2010-2012).”

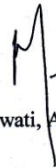
Yang ditulis oleh:

Nama : VIVI ANISA LUKITA PRAMESTI
NIM : B 200 100 330
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa jurnal publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2014

Pembimbing Utama



(Dra. Rina Trisnawati, Ak, M.Si, Ph.D)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 19 Laporan Realisasi APBD serta PDRB per Kapita di eks Karisedenan Surakarta. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja modal, pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan PAD dan DAU berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.

*Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum,
Belanja Modal*

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Penelitian Adi (2006) kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hansen dan Mowen (2009: 1) anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang sangat erat. Perencanaan adalah melihat ke masa depan menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengendalian adalah melihat masa lalu, melihat apa yang senyatanya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan

tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 1) menyatakan bahwa sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi masa depan. Organisasi dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. Suatu hubungan yang erat seharusnya terdapat di antara anggaran dan rencana strategis. Hubungan ini membantu manajemen untuk memastikan semua perhatian tidak terfokus pada jangka pendek. Hal ini penting karena sebagai rencana satu periode anggaran memiliki sifat untuk jangka pendek.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah daerah (Pemda). Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* atau teori agensi yang mana Pemda sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada Pemda menjadi relevan dan penting. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemda, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Halim (2007: 1) adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemda harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah Pemda juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki

dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemda terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan Pemda diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting Pemda maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pentingnya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, dan Dana alokasi umum terhadap Pengalokasian anggaran belanja modal yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam mengembangkan ketiga potensi pendapatan daerah tersebut sebagai aset dan sumber dana alokasi anggaran belanja modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi

Kasus di Kabupaten/Kota se-Eks Karisedenan Surakarta Tahun Anggaran 2010-2012).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal.

b. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan belanja modal terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi.

c. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi pemerintah khususnya sejauh mana pemerintah daerah dimasa otonomi menetapkan tingkat pengeluaran atau belanja masing-masing.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum APBD

Dalam kegiatan suatu organisasi baik kecil maupun besar apalagi organisasi pemerintah yang sangat luas dan kompleks memerlukan alokasi dana yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan organisasi pemerintah yang berkesinambungan. Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. APBD itu

sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota berusaha untuk menggunakan anggaran APBD sebaik mungkin untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berlaku untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tatacara yang berlaku pada pemerintah pusat.

B. Pengertian APBD

Penyusunan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah. Oleh karena itu, haruslah disusun dan dipertimbangkan dengan seksama yang dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2004: 24) menyatakan bahwa APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran.

Pengertian lain dari Badan Perencanaan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan (R-APBD) dan (RP-APBD).

Dari kedua pengertian diatas dapat menyimpulkan pemahaman dari pengertian APBD yaitu suatu rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk angka

yang meliputi semua sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan daerah dan pihak lain dan merupakan kredit-kredit guna melakukan belanja untuk suatu anggaran tertentu.

C. Fungsi APBD

Dalam buku yang diterbitkan oleh LAN RI (1996) menjelaskan bahwa APBD sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan .
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah, umumnya kepada daerah khususnya karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah didalam batas-batas tertentu.

D. Karakteristik APBD

Dalam reformasi keuangan daerah perubahan ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa dampak perubahan karakteristik APBD. Karakteristik APBD di era reformasi menurut Halim (2000: 4) adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepada daerah.
2. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhirtahun anggaran terdiri atas:
 - a. Laporan perhitungan APBD
 - b. Nota perhitungan APBD
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra.
3. Pinjaman APBD tidak lagi termasuk kedalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masuk kedalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah).
4. Masyarakat termasuk dalam unsure penyusunan APBD disamping Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD.
5. Indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup
 - a. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.
 - b. Perbandingan antara standar biaya dengan relisasinya.
 - c. Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
6. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa APBD pada era reformasi memiliki karakteristik struktur, perhitungan dan pertanggungjawaban yang dapat dikatakan sempurna. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerapan system

akuntansi yang sempurna dan akuntabilitas merupakan salahsatu prinsip dasar penyusunan. Selain itu pengawasan terhadap APBD juga menjadi lebih ketat karena melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh DPRD.

E. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Menurut Halim (2004), menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Dan definisi pendapatan daerah menurut *IASC Frame Work* adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang / kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari propinsi, penerimaan dari kabupaten/ kota dan kekurangan tunjangan fungsional guru.

3. Fungsi Anggaran Pendapatan Daerah

Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah fungsi anggaran pendapatan daerah dapat mengarah pada fungsi keuangan Negara yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Alokasi

Proses dimana sumber daya (resources) nasional dipergunakan untuk barang privat dan barang publik dimana keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Fungsi Retribusi

Peranan keuangan negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan, baik berdasarkan pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.

3. Fungsi Stabilitas

Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan makro pemerintah. Bila pemerintah menaikkan pajak, maka konsumsi rumah tangga berkurang komponen pengeluaran agregat. Sebaliknya apabila pemerintah menurunkan pajak maka konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dan pengeluaran agregat menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan out put (pendapatan nasional).

- 1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah**

Belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam APBD

yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut departemen keuangan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Hasil penelitian yang dilakukan Putro (2010) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemda. Untuk menambah aset tetap, Pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Arsyad (1999) dalam Hamzah dkk. (2007) mengemukakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut penelitian Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

PDRB yang dipublikasikan ada 3 macam yaitu: (1) PDRB per kapita, (2) PDRB atas dasar harga konstan 2000, tanpa migas, dan (3) PDRB atas dasar harga berlaku, tanpa migas. Dari 3 macam PDRB tersebut, penelitian ini memilih PDRB per kapita sebagai variabel untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi karena PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran/kesejahteraan rakyat di suatu daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di dalam penjelasan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan PAD sebagai variabel penelitian karena hasil pendapatan yang diperoleh Pemda dalam bentuk PAD bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik.

Menurut Mardiasmo (2002: 132) PAD merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari sini dapat ditarik simpulan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemda dalam memanfaatkan PAD.

Penelitian Rahmawati (2010) mendefinisikan DAU sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang ada. Pemilihan Pemerintah Kabupaten/Kota di Eks Karisedenan sebagai obyek penelitian karena hakekatnya sistem yang berlaku secara nasional, maka sudah cukup mewakili.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto & Supomo,1999). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Eks Karisedenan Surakarta yang berjumlah 7 Kabupaten/Kota. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasinya sehingga tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik sampling jenuh.

G. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogrov – Smirnov. Dari hasil pengujian normalitas menggunakan

Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

b. Uji Multikolinearitas.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode enter yaitu dengan melihat pada *Tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji Multikolinearitas dapat ditunjukkan dengan nilai *varian inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* dari tiap-tiap variabel independen. Suatu model regresi menunjukkan gejala Multikolinearitas jika nilai VIF di atas 10 sedangkan *tolerance value* di bawah 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa angka DW dibawah -2 yang berarti ada autokorelasi positif, Angka DW diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi dan angka DW diatas +2 yang berarti ada autokorelasi negatif. Dari tabel IV.6 tersebut diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada bagian *model summary* diperoleh angka

Durbin-Watson sebesar 1,593 yang terletak di antara -2 sampai $+2$, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Hasil analisis regresi linear berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (PRDB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 17 didapatkan persamaan regresi:

$$BM = -2,193 - 0,028PDRB + 7,991PAD + 3,213DAU$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 1) Konstanta sebesar $-2,193$ yang artinya, apabila variabel PDRB, PAD dan DAU tidak ada perubahan maka variabel belanja modal menurut sebesar $-2,193$.
- 2) Koefisien variabel PDRB sebesar $-0,028$ yang artinya jika variabel PDRB turun sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar $0,028$.
- 3) Koefisien variabel PAD sebesar $7,991$ yang artinya jika variabel PAD sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar $7,991$.
- 4) Koefisien variabel DAU sebesar $3,213$ yang artinya jika variabel DAU sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar $3,213$.

b. Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Hasil uji F didapatkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $29,784 > 3,52$ dan nilai signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti Hipotesis ditolak, sehingga variabel PDRB, PAD dan DAU berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal.

c. Uji R²

Analisis uji R² diketahui bahwa untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil perhitungan untuk nilai R² diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R² sebesar 0,828. Hal ini berarti bahwa 82,8% variasi variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, PAD dan DAU, sedangkan sisanya yaitu 17,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

d. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut:

Variabel PDRB diketahui nilai t_{hitung} (-1,407) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,539) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,180 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 ditolak, artinya PRDB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel PAD diketahui nilai t_{hitung} (6,489) lebih besar daripada t_{tabel} (2,539) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel DAU diketahui nilai t_{hitung} (7,434) lebih besar daripada t_{tabel} (2,539) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,012 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima, artinya variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

H. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai $t_{hitung} = (-1,407)$ lebih kecil daripada t_{tabel} (2,539) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,180 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 ditolak, artinya PDRB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Arsyad (1999) dalam Hamzah dkk. (2007) mengemukakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian ini PDRB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari, 2007 dan mendukung penelitian Putro (2010) dan Priyo Hadi Adi (2006). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis terhadap PAD memperoleh nilai $t_{hitung} = (6,489)$ lebih besar daripada $t_{tabel} (2,539)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD

dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari, (2007), Harianto dan Adi, (2007) dan mendukung penelitian Putro, (2010).

3. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis terhadap DAU memperoleh nilai $t_{hitung} = (7,434)$ lebih besar daripada $t_{tabel} (2,539)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima, artinya variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskus pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiaya belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. (Putro, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti penelitian ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari, (2007), Harianto dan Adi, (2007) dan penelitian Putro, (2010).

I. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel PDRB nilai t_{hitung} (-1,407) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,539) sehingga H_1 ditolak dan variabel PDRB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Variabel PAD memiliki nilai t_{hitung} (6,489) lebih besar daripada t_{tabel} (2,539) sehingga H_2 diterima dan variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.
3. Variabel DAU memiliki nilai t_{hitung} (7,434) lebih besar daripada t_{tabel} (2,539) sehingga H_3 diterima dan variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

J. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada tahun penelitian yaitu hanya 2010, 2011 dan 2012.
2. Keterbatasan penelitian ini hanya wilayah Propinsi Jawa Tengah terfokus terhadap wilayah se-eks karisedenan Surakarta saja.

K. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian mendatang sebaiknya memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang berbeda.
2. Bagi penelitian mendatang sebaiknya wilayah penelitian diperluas lagi, yaitu tidak terbatas di wilayah se-eks karisedenan Surakarta, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.

L. Daftar Pustaka

Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

David Harianto dan Prio Hari Adi, 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 juli 2007.

Ghozalli, I., 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta.

Hansen, Don. R. dan Maryanne M. Mowen, 2009. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 8: Salemba Empat, Jakarta.

Husein Umar, 2003. *Metode Riset "Akuntansi Terapan"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mutahara, Rizqi, 2010. *Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007-2009)*. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priyo Hari Adi, 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.
- Putro, Nugroho Suratno, 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi kasus Pada Kabupaten/Kota di Proponsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, 2007. *Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran*. The 1st Accounting Conference. Jakarta.

Singgih Santoso, 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Yamin, S., Rachmach, L. A. & Kurniawan, H., 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*, Jakarta: Salemba Empat.

www.djpk.depkeu.go.id

www.jateng.bps.go.id